

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kebijakan Kepala Sekolah dan Madrasah

Menurut Nichols dalam Saifullah Isri, bahwa: “kebijakan adalah suatu keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambilan keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang dan rutin yang terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan”.¹

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kebijakan diartikan sebagai hasil pemikiran penuh pertimbangan yang lama hingga benar-benar menghasilkan keputusan yang sempurna dan pada tingkatan terbaik. Selain itu menegaskan butuhnya waktu dalam memutuskan suatu kebijakan. Artinya, membutuhkan waktu dan kualitas pemikiran dalam merumuskan suatu kebijakan. Maka tidak ada keputusan yang diambil secara sembarangan melainkan harus ada berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan.

Keputusan tersebut tidaklah diambil melainkan oleh manajemen puncak yakni jika di lembaga pendidikan adalah kepala sekolah atau kepala madrasah. Tentu dalam hal menentukannya tidaklah berkaitan dengan aturan-aturan keputusan. Hal ini dikarenakan bukan hal yang menjadi kebiasaan dalam suatu program. Artinya, keputusan itu merupakan hal yang baru dan belum pernah atau masih akan dilaksanakan. Maka, dalam sebuah kegiatan suatu hal baru

¹ Saifullah Isri. *Kebijakan Pendidikan Islam*. (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2021), 120-121.

yang akan dilaksanakan harus atau membutuhkan identifikasi terhadap kondisi dan kemampuan lembaga pendidikan

Pendapat lain dikemukakan oleh Klein dan Murphy dalam Saifullah Isri, bahwa: “kebijakan berarti seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing sesuatu organisasi, kebijakan dengan demikian mencakup keseluruhan petunjuk organisasi”.²

Dalam pendapat ini kebijakan bagi lembaga pendidikan merupakan rangkaian dari tujuan, prinsip dan peraturan. Ketiga hal tersebut mengarahkan sebuah sekolah atau madrasah dalam setiap aktivitasnya. Selain itu juga menjadi landasan tujuan bagi sekolah atau madrasah. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa haruslah ada dasar bagi setiap sekolah atau madrasah di dalam menentukan berbagai pelaksanaan program.

Tujuan-tujuan di dalam pendidikan menjadikan tumpuan dalam menentukan berbagai kegiatan. Kegiatan yang akan ditetapkan jika tidak sesuai tujuan maka tidak akan menjadikan adanya keputusan dalam melaksanakannya. Justru akan mencari berbagai alternatif keputusan lain yang mendukung terhadap tercapainya tujuan-tujuan tersebut. Kemudian termasuk pula berbagai prinsip yang dipegang teguh oleh lembaga akan menjadi penentu diputuskan atau tidaknya suatu program. Dikarenakan tidaklah akan terlaksana kegiatan yang justru bertentangan dengan prinsip yang sudah ada. Maka akan menimbulkan berbagai gejolak jika keputusan yang diambil menyimpang dari

² Ibid.

prinsip dan tujuan lembaga atau bahkan akan semakin memperburuk situasi jika justru tidak sesuai dengan tujuan yang ada.

Hough dalam Saifullah Isri juga menegaskan sejumlah arti kebijakan. Kebijakan bisa menunjuk pada seperangkat tujuan, rencana atau usulan, program- program, keputusan-keputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta undang-undang atau peraturan-peraturan.³

Dalam uraian di atas menyebutkan berbagai hal yang menunjukkan suatu kebijakan. Pertama, tujuan. Tujuan bagi lembaga pendidikan merupakan hal yang penting dalam mengarahkan setiap kegiatan yang ditetapkan agar tidak melakukan hal-hal yang tidak mengarahkan pada keberhasilan tujuan atau bahkan menghambat tercapainya tujuan. Kedua, rencana atau usulan. Dalam hal ini berbagi rencana adalah merupakan hal yang pasti akan dipertimbangkan secara matang dan tidak tergesa-gesa karena rencana ini sebagai langkah awal sebelum terlaksananya suatu program, sehingga perencanaan yang baik akan terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Ketiga, program. Hal ini berkaitan dengan rancangan kegiatan yang akan akan dilaksanakan. Maka program merupakan bentuk keputusan yang telah diambil di dalam menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan.

Keempat, keputusan. Hal ini menjadi jelas bahwa salah satu hal yang tergambar dari kebijakan adalah adanya keputusan-keputusan yang telah diambil. Kelima, pengaruh. Hal ini menandakan kebijakan adalah pengaruh yang dapat menjadikan seseorang bergerak atau tidak dan terlaksananya suatu

³ Ibid.

hal atau tidak. Dan keenam, peraturan. Adanya peraturan merupakan sebuah hasil dari kebijakan yang keberadaannya adalah sebagai bentuk arah dan batasan-batasan di dalam melakukan suatu kegiatan dalam sebuah lembaga pendidikan.

Duke dan Canady dalam Saifullah Isri mengelaborasi konsep kebijakan dengan delapan arah pemaknaan kebijakan, yaitu: (1) kebijakan sebagai penegasan maksud dan tujuan, (2) kebijakan sebagai sekumpulan keputusan lembaga yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, mempromosikan, melayani, dan lain-lain pengaruh dalam lingkup kewenangannya, (3) kebijakan sebagai panduan tindakan diskresional, (4) kebijakan sebagai strategi yang diambil untuk memecahkan masalah, (5) kebijakan sebagai perilaku yang bersanksi, (6) kebijakan sebagai norma perilaku dengan ciri konsistensi, dan keteraturan dalam beberapa bidang tindakan substantive, (7) kebijakan sebagai keluaran sistem pembuatan kebijakan, dan (8) kebijakan sebagai pengaruh pembuatan kebijakan, yang menunjuk pada pemahaman khalayak sasaran terhadap implementasi sistem.⁴

Kebijakan dalam hal ini berkaitan dengan penegasan maksud dan tujuan, keputusan lembaga, tuntunan dalam kebebasan pengambilan keputusan sendiri berdasarkan situasi yang dihadapi, strategi pemecahan masalah, perilaku yang berkaitan dengan sanksi, aturan berperilaku yang bersifat konsisten, sistematis dalam bidang tindakan yang nyata, keluaran kebijakan, pengaruh terhadap pemahaman khalayak untuk memahami pelaksanaan sistem.

⁴ Ibid.

Pengambilan keputusan merupakan suatu metode yang teratur terhadap masalah yang sebenarnya, fakta dan data yang dihimpun, ketepatan menentukan dari setiap pilihan yang ada dan pertimbangan dalam pengambilan sikap, sikap yang paling tepat. Dari kelima arti tersebut memberikan gambaran terhadap lima hal penting, antara lain: pertama, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan terencana; kedua, haruslah tepat dalam pengambilan keputusan; ketiga, adanya kejelasan dalam mengidentifikasi masalah; keempat, keteraturan dan keterbaruan terhadap fakta dan data menjadi dasar dalam pengambilan keputusan; kelima, dari berbagai alternatif yang ada, pengambilan keputusan adalah tindakan yang terbaik.⁵

Kebijakan adalah rangkaian ide dan dasar sebagai petunjuk dan landasan rencana dari suatu aktivitas yang akan diimplementasikan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Penggunaan istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok wilayah swasta, serta individu. Kebijakan tidak dapat disamakan dengan peraturan dan hukum. Unsur paksaan dan larangan suatu perilaku (misalnya pembayaran pajak penghasilan yang diharuskan suatu hukum), kebijakan sekedar petunjuk dalam bertindak dengan kemungkinan mendapatkan hasil yang diinginkan.⁶

Kebijakan sebagai aturan atau ketentuan tertulis dari keputusan resmi kelompok, bersifat mengikat, pengaturan perilaku dalam pencapaian tujuan,

⁵ Moch Fakhruroji, *Pola Komunikasi dan Model Kepemimpinan Islam*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2019), 51-52.

⁶ Muhammad Sawir, *Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik: Konseptual dan Praktik* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2021), 123.

menciptakan tata nilai baru dalam lembaga atau organisasi. Kebijakan sebagai sumber rujukan seluruh anggota organisasi atau lembaga dalam berperilaku (*behavior*). Kebijakan bersifat penyelesaian masalah dan lebih aktif, berbeda dengan peraturan (*regulation*) dan hukum (*law*) serta kebijakan bisa lebih penyesuaian dengan keadaan dan adanya penafsiran, mengatur perilaku. Kebijakan seharusnya bersifat universal dengan memperhatikan ciri lokal secara khusus. Maka kebijakan memberikan kesempatan dengan istilah berdasarkan kondisi.⁷

Makna kias dari kata kebijakan dan kebijaksanaan dapat diketahui melalui bahasa Indonesia. Pengertian itu membedakan sifat bijaksana dengan seseorang yang hanya pintar (*clever*) dan cerdas (*smart*). Ahli ilmu pada suatu bidang arti dari pintar sedangkan cerdas diartikan sebagai sifat seseorang dengan kecepatan berpikir dan menemukan solusi atas permasalahan, maka orang cerdas mampu dengan tepat memberikan jawaban terhadap suatu masalah atau pertanyaan. Sedangkan kemungkinan orang yang bijaksana tidak mampu memberikan jawaban di waktu yang sama sebagai kemungkinan dianggap bijaksana. Artinya, bijaksana memberikan jawaban di waktu yang tepat dan berdasarkan sasaran. Sehingga makna kias tersebut memiliki hubungan pada ilmu kebijakan. Kemudian, perlu diingat suatu hal pada istilah kebijakan tetap berarti berkaitan dengan implementasi secara nyata daripada pengusulan melalui tindakan suatu masalah.⁸

⁷ Arwildayanto, *et.al.*, *Analisis Kebijakan Pendidikan: kajian Teoretis, Eksploratif, dan Aplikatif* (Bandung: CV Cendekia Press, 2018), 6.

⁸ Ravyansah, *et.al.*, *Kebijakan Publik* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 3.

Ada tiga hal yang menjadi unsur-unsur utama dalam kebijakan pendidikan. Pertama, unsur masalah yang berhubungan dengan berbagai bidang yang dikerjakan oleh pemerintah. Unsur ini lebih dikenal dengan bidang ideologi, politik, social-budaya, pertahanan dan keamanan. Kedua, unsur tujuan berkaitan dengan pencapaian sasaran dengan berbagai program yang ditetapkan Negara yang harus dilalui. Ketiga, unsur cara kerja atau cara pemecahan masalah berhubungan dengan proses yang teratur berlandaskan peraturan yang berlaku.⁹

Unsur masalah yang menandakan bahwa tidaklah ada atau muncul suatu kebijakan melainkan dikarenakan ada masalah yang harus di hadapi dan diselesaikan atau justru masalah itu membersamai kebijakan tadi. Masalah nasional yang merupakan masalah yang lebih dekat dengan kita justru harus segera dituntaskan agar tidak terus menjalar lebih meluas di dalam negeri. Namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa masalah internasional juga harus diwaspadai dikarenakan walau jauh dari kita, bisa saja sewaktu-waktu masalah itu menimpa kita dan kita harus mempersiapkan untuk menghadapinya.

Unsur tujuan menunjukkan bahwa kebijakan ada dengan salah satunya pola tujuan yang dimaksud dan tidak begitu saja ada. Kemudian unsur cara kerja dan cara pemecahan masalah yang artinya kebijakan mengandung solusi atas masalah yang berisi sistematika kegiatan yang tidak melanggar peraturan.

Kepala sekolah wajib mempunyai pembaruan rencana yang cermat selaku motor dan penentu kebijakan dalam lembaga pendidikan: (a)

⁹ Abd. Majid, *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), 16

penyusunan program kerja baik harian hingga tahunan secara tertulis dengan desain yang besar dan diletakkan pada dinding ruangnya; (b) penyiapan visi misi tertulis lembaga pendidikan yang diletakkan di depan pintu ruang lembaga pendidikan sebagai pajangan. Sosialisasi visi misi yang diharuskan bagi seluruh warga sekolah termasuk pada wali murid; (c) sarana dan prasarana yang dipersiapkan termasuk pengadaan bagi kebutuhan guru dalam kegiatan belajar mengajar sebagai penunjang visi misi lembaga pendidikan; (d) semua warga sekolah yang paling utama adalah para pengajar yang diberikan tugas sebagai wakil kepala sekolah dilakukan sebuah pendekatan terhadap mereka; (e) komunikasi yang terjaga dengan baik pada seluruh warga sekolah; (f) menunjangi dan memupuk persahabatan diantara personel tiap bagian sekolah; (g) rencana anggaran diusahakan tidak ditutup-tutupi tentang pembiayaan dan mengacu pada kebutuhan guru ketika kegiatan belajar mengajar dengan melibatkannya.¹⁰

Dalam hal ini tindakan yang harus diambil oleh kepala sekolah dan madrasah adalah tidak hanya berkaitan dengan pembaruan dalam penyusunan program saja, melainkan ada berbagai hal penting yang perlu diperhatikan. Mengenai kejelasan visi-dan misi lembaga sehingga semua bisa menjadikan tujuan bersama, sehingga tidak ada lagi yang bergerak dalam lembaga tanpa visi misi. Selain itu yang menjadikan kemudahan dan tercapainya visi-misi dengan menyediakan saran dan prasarana sesuai dengan kebutuhan proses

¹⁰ Desi Rahmawati, Umar, Najamudin, "Strategi Inovasi Kepala Sekolah dalam Perencanaan Program Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila," *Ainara Journal* (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan) Vol. 4, No. 3 (Desember, 2023): 176.

pendidikan. Harus dipenuhi pula jalinan keakraban dengan seluruh anggota sekolah dengan mengunjungi ke setiap bagian ruang kerja. Perlu diperhatikan pula bahwa jalinan komunikasi perlu dipupuk agar tidak terjadi kesalah pahaman dan ketidakjelasan informasi. Guru-guru jangan pernah luput dari perhatian bahwa mereka juga memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi guna menunjang terselenggarakannya proses pendidikan secara maksimal.

Usman dalam Dwi Nur menyatakan bahwa, kepala sekolah sebagai pemegang kendali penuh dalam lingkungan lembaga pendidikan yang sesuai dengan peran dan fungsinya selaku individu, pengelola, pengawas utama, social dan wirausaha. Adanya fungsi-fungsi tersebut pemimpin lembaga pendidikan diharapkan bisa membangun kerjasama bersama semua pendidik guna mencetak siswa yang memiliki moral yang relevan dengan cita-cita bangsa dan agama, sehingga baik jumlah maupun kualitas siswa di lembaga pendidikan bisa menjadi cermin bagi lembaga pendidikan lainnya, dan berkualitasnya lulusan muda sebagai generasi penerus. Sholeh dalam Dwi Nur menyatakan hal senada bahwa pimpinan lembaga pendidikan sebagai pengelola yang bertugas melakukan pengontrolan aktivitas pendidikan di lembaganya, melalui berbagai kebijakan dapat diambil dengan adanya hak dan wewenangnya, dengan membawa siswa pada cita-cita lembaga pendidikan dan visi misinya menjadi hal yang diharapkan.¹¹

¹¹ Dwi Nur Indah Sari, Rahma Sabilla, Farid Setiawan, "Peran Kepala Sekolah dan Guru dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila," *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* Vol.3, No.1 (Maret, 2023): 78.

Kepala sekolah dan madrasah tidak akan lepas dari adanya kerjasama dengan para guru dengan tujuan mencetak lulusan yang tidak hanya dari segi kuantitas memadai namun juga adanya aspek kualitas yang mumpuni. Mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas namun juga bermoral sehingga mencetak generasi penyelesaian masalah bukan generasi yang bermasalah. Semuanya dapat terlaksana apabila kepala sekolah dan madrasah mengontrol dengan serius segala aspek dalam lembaga pendidikan yang dipimpin. Terutama adanya kebijakan-kebijakan yang mengarahkan kepada visi-misi dan cita-cita lembaga.

Begitu pentingnya pemimpin lembaga pendidikan yang berperan terhadap kepastian arah dan tujuan lembaga pendidikan. Baik atau tidaknya kualitas lembaga pendidikan menjadi tanggung jawabnya. Artinya, pemimpin lembaga pendidikan harus paham pengelolaan demi kemajuan lembaganya. Pemimpin yang pencasilais yaitu yang mengutamakan sikap dan moral sebagai pimpinan lembaga dibutuhkan dalam usaha implementasi dan penguatan P5. Dimensi profil pelajar pancasila dalam uraian P5 berusaha diwujudkan dan diinternalisasikan.¹²

Begitu pentingnya posisi kepala sekolah dan madrasah dikarenakan di tangannya lah berkualitas atau tidaknya lembaga yang dipimpinnya dipertaruhkan. Dengan demikian majerial yang dipahami dengan diterapkan secara baik akan mendukung pencapaian kualitas lembaga. Maka dalam hal ini

¹² Ailatul Maula dan Ainur Rifqi, "Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SDN Sidotopo I/48 Surabaya," *Journal Edu Learning* Vol. 2, No. 1 (Juli, 2023): 74.

upaya penerapan P-5/PPRA memerlukan pemimpin yang menjadikan sikap dan moral sebagai hal yang ditamakan.

B. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin (P5-PPRA)

Profil pelajar Pancasila adalah bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional. Profil pelajar Pancasila memiliki peran sebagai rujukan utama yang memberikan arah seluruh kebijakan pendidikan sekaligus sebagai acuan bagi seluruh pendidik dalam rangka pembangunan karakter serta kemampuan peserta didik. Profil pelajar Pancasila dengan perannya yang urgen seharusnya bisa dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Profil ini diperlukan hal yang simple, dapat dengan mudah diingat dan dijalankan baik oleh guru maupun siswa agar berlangsung dalam aktivitas harian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, profil pelajar Pancasila terdiri dari enam dimensi, yaitu: 1) beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, 2) mandiri, 3) bergotong-royong, 4) berkebinekaan global, 5) bernalar kritis, dan 6) kreatif.¹³

Keenam dimensi yang ada dalam profil pelajar pancasila adalah bukti bahwa sebuah lembaga tidak hanya dituntut menjadikan siswa cerdas dalam ilmu pengetahuan belaka, melainkan ada aspek keimanan dan sikap yang perlu

¹³ Badan Standar, Kurikulum dan Assesmen Pendidikan, *Dimensi, Elemen, dan Subelemen profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum, Merdeka* (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2022), 2.

dibentuk. Mereka juga dibentuk menjadi pribadi yang berwawasan global, sehingga tidak menjadikan jarak dan wilayah sebagai batas. Mereka pun dituntut agar mampu memiliki daya analisa yang tajam, sehingga dapat menyikapi permasalahan dengan solusi yang tepat.

Tidak berbeda dengan sekolah secara umum, sekolah umum berciri khas agama seperti madrasah pun juga memiliki konsekuensi mengikuti kebijakan kemendikbudristek, tentu dengan adanya penyesuaian dengan karakteristik, kekhasan, dan kebutuhan madrasah. Pengintegrasian nilai-nilai agama Islam dalam penyusunan kurikulum untuk menumbuhkan jati diri dan kekhasan madrasah. Berdasarkan hal tersebut diharapkan pola pikir, pola sikap dan tindakan dalam menghadapi situasi pendidikan dengan kebijakan dan praktik pendidikan di madrasah menjadikan nilai-nilai agama sebagai hal yang mewarnainya. Maka di madrasah pun terdapat Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin (P5-PPRA) yang dikembangkan dari Panduan Pengembangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di Satuan Pendidikan, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.¹⁴

Madrasah pun juga harus ikut andil tidak hanya dalam pembentukan pengetahuan, namun sikap dan cara bertindak harus ditanamkan pada setiap siswa di lembaga yang berciri khas ini. Karakteristik lembaga yang bernuansa

¹⁴ Direktur KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kemenag RI, *Panduan pengembangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin*, (Direktur Jenderal, 2022), iv.

Islami jangan sampai justru menimbulkan banyak kontra dengan nilai-nilai Islam. Jangan sampai pula tidak melihat kepada kebutuhan lembaga akan tujuannya mencetak generasi Islam dengan nilai-nilai Islam yang sebenarnya.

Cara berpikir, bersikap dan perilaku yang menggamabarkan seluruh nilai tinggi dari Pancasila yang global demi persatuan dan kesatuan bangsa serta perdamaian dunia terwujud dengan toleransi yang begitu diagungkan dalam Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin yang selanjutnya disebut profil pelajar, merupakan pelajar yang memiliki pola pikir, bersikap dan berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila yang universal dan menjunjung tinggi toleransi demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa serta perdamaian dunia. Profil Pelajar juga memiliki pengetahuan dan keterampilan berpikir antara lain: berpikir kritis, memecahkan masalah, metakognisi, berkomunikasi, berkolaborasi, inovatif, kreatif, berliterasi informasi, berketakwaan, berakhlak mulia, dan moderat dalam keagamaan.¹⁵

Sama halnya dengan di sekolah profil pelajar yang hendak dicetak adalah seorang yang cerdas namun juga patuh dan tunduk pada penciptanya. Memiliki akhlak yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Selain itu juga mampu menganalisa secara tajam sehingga dapat menemukan jalan keluar atas berbagai problem yang terjadi.

Keoptimalan berjalannya implementasi projek penguatan pelajar Pancasila akan terwujud jika lembaga pendidikan sebagai wadah pelaksana P5

¹⁵ Ibid. 1.

bersedia memudahkan implementasi proyek. Lembaga siap tidak hanya memudahkan dalam aspek sarana dan prasarana, namun juga pada pelatihan atau supervise terhadap pendidik atau fasilitator dan evaluasi serta tindak lanjut manajemen lembaga pendidikan. Tata cara kerja baku haruslah ada dan disusun dengan jelas untuk kegiatan P5. Penyusunnya adalah manajemen lembaga pendidikan bersama komite pembelajaran yang jika sudah disepakati kemudian disosialisasikan kepada semua pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik bahkan wali murid. Implementasi program akan maksimal jika komite lembaga pendidikan, masyarakat, dan pengawas terlibat dalam setiap aspek kegiatan manajemen mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Penentuan dalam penggunaan waktu oleh satuan pendidikan sangat dibutuhkan, sehingga pendidik bisa bekerja sama. Kunci sukses atau tidaknya suatu proyek akan terwujud dengan adanya kerja sama yang baik.¹⁶

Kesiapan dan fasilitas yang memadai penting guna terselenggaranya P-5/PPRA di lembaga pendidikan. Hal ini dikarenakan disaat sekolah dan madrasah tidak siap maka akan menjadi masalah besar karena berbagai ketidakmampuan akan menghambat berjalannya proyek. Selain itu perlu adanya fasilitas yang mendukung atau memudahkan terlaksananya proyek sehingga tidak ada hambatan di dalam pelaksanaannya. Harus pula ada SOP yang jelas dan melibatkan berbagai anggota mulai dari perencanaan hingga evaluasinya, sehingga pelaksanaan program dapat terlaksana dengan maksimal.

¹⁶ Yuntawati, I Wayan Suastra, "Proyek P5 sebagai Penerapan Diferensiasi Pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka: Literature Review Studi Kasus Implementasi P5 di Sekolah," *Empiricism Journal*, Vol 4, No 2 (Desember, 2023): 522.